

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Data Inflasi Kota Yogyakarta 2025 (M to M)

Wilayah Inflasi	Juli	Agustus	September
Kota Yogyakarta	0,17%	-0,21%	0,27%
Nasional	0,30%	-0,08%	0,21%

Data Inflasi Kota Yogyakarta 2025 (Y o Y)

Wilayah Inflasi	Juli	Agustus	September
Kota Yogyakarta	2,54%	2,28%	2,72%
Nasional	2,37%	2,31%	2,65%

- Pada Juli 2025 terjadi inflasi year on year (y-on-y) Kota Yogyakarta sebesar 2,54 persen. Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 3,33 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,94 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,53 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,31 persen; kelompok kesehatan sebesar 1,04 persen; kelompok transportasi sebesar 1,07 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,71 persen; kelompok pendidikan sebesar 1,48 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,59 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 13,68 persen.
- Pada Agustus 2025 terjadi inflasi year on year (y-on-y) Kota Yogyakarta sebesar 2,28 persen. Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 3,07 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,89 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,52 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,30 persen; kelompok kesehatan sebesar 1,03 persen; kelompok transportasi sebesar 0,16 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,17 persen; kelompok pendidikan sebesar 1,65 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,62 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 13,00 persen.
- Pada September 2025, inflasi year on year (y-on-y) Kota Yogyakarta tercatat sebesar 2,72 persen. Beberapa kelompok pengeluaran yang mengalami kenaikan harga, antara lain: Kelompok makanan, minuman, dan tembakau naik 4,15 persen; Kelompok pakaian dan alas kaki naik 1,90 persen; Kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga naik 1,63 persen; Kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,40 persen; Kelompok kesehatan naik 1,08 persen; Kelompok transportasi naik 0,60 persen; Kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya

sebesar 0,86 persen; Kelompok pendidikan naik 1,65 persen; Kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,54 persen; Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya naik 14,76 persen.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

- Harga komoditas bawang merah sempat mengalami kenaikan pada periode bulan Juli akibat berkurangnya pasokan dari daerah sentra seiring berlalunya masa panen raya. Di samping itu, isu mengenai kebijakan larangan truk ODOL turut mempengaruhi kelancaran distribusi komoditas bawang merah.
- Harga komoditas beras turut mengalami kenaikan pada periode bulan September. Penyaluran beras SPHP dan Gerakan Pangan Murah menjadi salah satu upaya dalam menjaga kestabilan harga beras.
- Salah satu penyebab kenaikan harga beras adalah naiknya harga gabah di tingkat petani. Untuk memenuhi kebutuhan beras di Kota Yogyakarta, Pemkot Yogyakarta telah melaksanakan KAD dengan Pemkab Bantul. Namun pelaksanaan KAD ini juga terkendala dengan tingginya harga gabah di petani Bantul, sehingga turut mempengaruhi daya saing beras Bantul yang akan dipasok ke Kota Yogyakarta. Di samping itu, kebijakan efisiensi anggaran berdampak pada tidak adanya subsidi biaya distribusi untuk komoditas beras dimaksud.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

- Dalam rangka penambahan wawasan terkait pengendalian inflasi, dilaksanakan kegiatan Capacity Building dengan tema “Strategi Pemilihan Kerja Sama Antardaerah”, pada tanggal 9 Juli 2025.
- Dalam rangka evaluasi pelaksanaan KAD dengan Pemkab Bantul, dilaksanakan rapat koordinasi pada tanggal 16 Juli 2025.
- Dalam rangka sinergi dan koordinasi terkait pengendalian inflasi, dilakukan High Level Meeting (HLM) TPID Kota Yogyakarta pada tanggal 22 Juli 2025.
- Pelaksanaan sidak ke gudang beras, dalam rangka memastikan kondisi pasokan dan harga beras, tanggal 28 Agustus 2025.
- Gerakan Pangan Murah serentak di seluruh Kemantren (Kecamatan) di Kota Yogyakarta, tanggal 30 Agustus 2025.
- Dalam rangka keterbukaan informasi, dilakukan update harga barang kebutuhan pokok di aplikasi JSS. Di samping itu, turut dilakukan kegiatan Peliputan, Jumpa Pers wartawan, release berita ke media cetak, media elektronik dan media sosial. Dokumentasi kegiatan tersebut dapat diakses pada tautan:

<https://warta.jogjakota.go.id/detail/index/41263/inflasi-masih-terkendali-tpid-yogya-diharap-antisipasi-produk-sensitif-harga---2025-07-22>;

<https://warta.jogjakota.go.id/detail/index/42401/pemkot-yogya-tpid-pastikan-stok-beras-tersedia-harga-terkendali-2025-08-28>;

<https://warta.jogjakota.go.id/detail/index/42426/gerakan-pangan-murah-serentakdigelar-di-14-kemantren-di-yogya-2025-09-01>

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

- Berdasarkan hasil diskusi pada HLM TPID, penguatan kerja sama daerah menjadi hal penting dalam rangka pengendalian inflasi. Kerja sama tersebut dapat berupa Kerja Sama Antar Daerah (KAD) atau dengan Instansi dan lembaga lainnya yang berada di wilayah Kota Yogyakarta.
- Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah mutu, kualitas, dan keamanan pangan yang dipasok dari Kabupaten Bantul ke Kota Yogyakarta. Gapoktan Bantul menyampaikan telah melakukan uji laboratorium terhadap produknya sebelum pemasaran produk. Di samping itu, pedagang pasar juga menyampaikan umumnya konsumen lebih tertarik dengan produk dengan penampilan bagus, seperti beras yang putih dan cabe yang merah mengkilap.
- Salah satu strategi yang dapat dilakukan dalam menjaga keberlangsungan KAD adalah melalui subsidi biaya distribusi. Dikarenakan adanya kebijakan efisiensi anggaran, Pemkot Yogyakarta tidak memiliki alokasi untuk subsidi biaya distribusi. Berdasarkan hasil rapat koordinasi dan evaluasi KAD antara Pemkot Yogyakarta dan Pemkab Bantul, terdapat wacana opsi agar subsidi biaya distribusi tersebut dapat difasilitasi oleh Bank Indonesia DIY, yang akan dibahas lebih lanjut.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

- Terus dilakukan pemantauan harga dan pasokan barang baik dilakukan sendiri oleh TPID Kota Yogyakarta maupun bersama-sama TPID Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Dilakukan pemetaan potensi dari masing-masing Kabupaten/Kota untuk peninjauan kerja sama antar daerah baik antar Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta atau di luar Daerah Istimewa Yogyakarta.